

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik. dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Halim dan Iqbal, 2012).

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik, menimbulkan impikasi bagi manajemen pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Senada dengan hal tersebut Mardiasmo (2012) mengatakan dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dengan laporan tersebut. Agar akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan, diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, transparansi, adil, efektif dan efisien. Sistem yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem informasi manajemen daerah.

Menurut Inayah, et.,al (2016) bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang lebih dikenal SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini dipertegas oleh Abdullah, et.,al (2018) bahwa kegunaan sistem informasi dalam mendukung kebutuhan informasi. Pada tingkat kemampuan sistem informasi yang tinggi dimana sebagian besar kebutuhan informasi organisasi dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut telah berhasil. SIMDA keuangan merupakan alat yang dipakai pengguna akhir untuk menghasilkan laporan keuangan bagi proses pengambilan keputusan. Pemanfaatan informasi yang dihasilkan SIMDA keuangan akan memberikan masukan dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan dan program pembangunan.

Selain sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), pengendalian intern juga merupakan aspek yang penting dalam pengembangan akuntabilitas keuangan. Pemerintah yang mampu menerapkan sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik, maka akan mampu untuk mewujudkan visi dan misinya dalam hal tata

kelola pemerintahan yang baik. Menurut Mahmudi (2015) pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dirujuk oleh Darise (2009) meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assesment*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), aktivitas pengendalian (*control activities*), dan pementauan (*monitoring*). Dari kelima komponen sistem pengendalian intern tersebut, komponen lingkungan pengendalian merupakan fondasi untuk keseluruhan komponen.

Hubungan antara sistem pengendalian intern dengan akuntabilitas yakni positif, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo yang dirujuk oleh Primayani, et.,al (2014) bahwa pengendalian yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai, sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Permasalahan tersebut tentunya merupakan dampak dari kurang optimalnya sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian intern. Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan predikat wajar dengan Pengecualian (WDP) pada pengelolaan keuangan TA 2017. Hasil tersebut diperkuat dengan temuan BPK (2018) bahwa (1) aset tetap peralatan dan mesin yang tidak dapat diketahui keberadaannya. (2) biaya perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi yang belum dikapitalisasi ke aset terkait pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. (3) Biaya ganti rugi tanaman dan bangunan sebesar belum dikapitalisasi ke Aset Tanah terkait; dan (4) aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan buku-buku tidak dapat diketahui keberadaannya serta tidak dapat dirinci item jenis asetnya

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan diterapkannya sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian intern yang optimal maka diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat tercapai khususnya akuntabilitas pada SKPD. Namun kenyataannya pada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara masih terdapat masalah mengenai akuntabilitas, seperti publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas,

tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berbagai masalah di atas, menunjukkan masih kurangnya pengawasan intern yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masih timbul berbagai masalah tersebut disebabkan kurangnya pengawasan intern dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif atau pun legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga BPK masih menemukan berbagai kesalahan dalam hal penyajian. Berbagai masalah tersebut tentunya dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang kurang baik yang hingga kini masih terdapat berbagai kekurangan, hal tersebut dapat dilihat dari temuan BPK (2019) bahwa (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran belum memadai; (2) Aset Tanah belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal; (3) Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum tertib

Berbagai hasil tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak dari 2 aspek tersebut terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Juminansyah, et.,al (2018) dengan judul penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan untuk menunjang akuntabilitas Keuangan di

Sekretariat daerah Kabupaten Kutai Timur. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Widyaningsih (2015) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada lokasi dan sampel penelitian. Dimana penelitian ini memfokuskan pada keseluruhan SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sementara penelitian terdahulu hanya fokus pada 1 instansi. Sementara itu dari analisis yang digunakan, dimana penelitian terdahulu hanya fokus pada variabel pengendalian intern ataupun hanya pada SAKD sementara penelitian ini menggunakan kedua variabel yang mampu memberikan tendensi bagi keberhasilan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan akuntabilitas publik, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena

laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial

2. Terkait dengan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan pengendalian intern yakni masih terdapat masalah yang di rekomendasikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo padahal Kabupaten Gorontalo Utara telah mendapatkan Wajar Tanpa pengecualian pada tahun 2018.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yakni:

1. Apakah penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara?
3. Apakah penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan atas penelitian yang dilakukan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya tentang sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), sistem pengendalian intern dan akuntabilitas. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan akuntabilitas serta memberikan masukan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.